Jurnal BPPK Volume 10 Nomor 2 Tahun 2017 Halaman 43 s.d. 58

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

JURNAL BPPK

KESENJANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA: STUDI EMPIRIS BERDASARKAN SUSENAS 2008, 2011 DAN 2013

Heryanah
Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi, Email: *heryanah@bps.go.id*

INFO ARTIKEL

SEJARAH ARTIKEL
Diterima Pertama
14 Maret 2017

Dinyatakan Dapat Dimuat
6 Desember 2017

KATA KUNCI:
Kesenjangan pendapatan;
SUSENAS;
Teknik Dekomposisi Indeks;
Theil Indeks.

ABSTRAK

The purpose of this essay is to potray income inequality in Indonesia based on Data of SUSENAS 2008, 2011 and 2013. First chapter describe inequality in Indonesia by using 3 kinds of inequality measurements, namely: World Bank Criterion, Gini Indeks and Theil Indeks. Second chapter analize income inequality by decompose inequality using theil indeks decomposition technique into inequalty between locations, education, age groups and household member. The results show that in general the level of income inequality in Indonesia over a period of 5 years is included in the category of medium gap and shows an upward trend in 10 years. The results of the Theil index decomposition show that the gap between the categories of education is the highest contributor to the income gap in Indonesia, followed by the urban-rural inequality and the gap between provinces. Meanwhile, the gender gap, the gap between household members, and the gap between age groups is not the most important factor of the overall gap

Tulisan ini bertujuan untuk melihat kondisi kesenjangan pendapatan di Indonesia berdasarkan data SUSENAS 2008, 2011 dan 2013. Bagian pertama menjabarkan kesenjangan di Indonesia dengan menggunakan 3 ukuran kesenjangan, yaitu Kriteria Bank Dunia, gini koefisien dan theil indeks. Bagian kedua menjabarkan teknik dekomposisi indeks theil, dimana kesenjangan pendapatan dianalisis dengan menguraikan menjadi berbagai kategori, yaitu kesenjangan antar perkotaan dan pedesaan, kabupaten/kota, antar-provinsi, kelompok pendidikan, gender, kelompok usia dan jumlah anggota rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia selama periode 5 tahun termasuk dalam kategori kesenjangan sedang dan menunjukkan kecenderungan naik dalam 10 tahun belakang ini. Hasil dari dekomposisi Theil indeks memperlihatkan bahwa kesenjangan antara kategori pendidikan merupakan penyumbang tertinggi terhadap kesenjangan pendapatan di Indonesia, disusul oleh kesenjangan antar perkotaan-pedesaan dan kesenjangan antara provinsi. Sementara, kesenjangan gender, kesenjangan antara anggota rumah tangga, dan kesenjangan antara kelompok usia bukanlah faktor terpenting dari kesenjangan secara keseluruhan

1. PENDAHULUAN

Membicarakan masalah keberhasilan pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pembahasan mengenai kesenjangan, karena kesenjangan sering dijadikan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan di suatu daerah, seperti yang dijabarkan Dudleey Seer bahwa menurunmya tingkat kesenjangan pendapat, jumlah penduduk miskin dan pengangguran merupakan indikator keberhasilan pembangunan dari suatu daerah (Todaro dan Smith, 2003)

Hubungan antara pembangunan dan kesenjangan pendapatan telah menjadi fokus akademik sejak bertahun-tahun lalu. Simon Kuznet memprakasai kajian dengan melihat korelasi antara 2 variable tersebut (Ray, 1998). Dalam *paper*-nya yang kemudian menjadi acuan banyak peneliti, Kuznets (1995) mengungkapkan bahwa hubungan antara tingkat distribusi pendapatan dan tingkat pembangunan ekonomi mengambil bentuk seperti U-terbalik (*inverted-U curve*). Dengan kata lain, pada awal perkembangan ekonomi, distribusi pendapatan akan menyebabkan kesenjangan pendapatan semakin tinggi, tetapi seiring dengan semakin matangnya sebuah perekonomian kesenjangan pendapatan tersebut akan menurun perlahan setelah melewati titik puncak.

Laporan perkembangan terakhir oleh Mahi dan Suahasil (2012) mengungkapkan bahwa walaupun memiliki kinerja yang baik dalam pembangunan ekonomi selama 4 dekade terakhir, Indonesia masih memiliki masalah jangka panjang yaitu masalah kesenjangan regional. Sebenarnya, kesenjangan antar daerah di Indonesia bukanlah masalah baru. Para ekonom telah menyadari dan berupaya mengatasi masalah tersebut. Hal ini dibuktikan pada tahun 1976, Emil Salim (1976) telah menulis topik ini dalam pidato

Dies Natalis di Universitas Indonesia. Dia menulis bahwa proses pembangunan yang berlangsung selama tahun 1961-1970 telah menyebabkan ketidakmerataan penyebaran pendapatan. Walaupun sejak tahun 1980 pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan tingkat pertumbuhan yang cepat (diluar krisis pada tahun 1997), sepertinya pertumbuhan tersebut tidak diikuti dengan distribusi pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah Indonesia.

Ketidaksetaraan daerah di Indonesia dapat dilihat dari beberapa dimensi yaitu kesenjangan antara bagian barat dan timur Indonesia, yang dikenal sebagai KBI (Kawasan Barat Indonesia) dan KTI (Kawasan Timur Indonesia), ketimpangan antar provinsi, antar wilayah dalam satu propinsi, dan antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Penelitian mengenai kesenjangan pendapatan di Indonesia telah banyak dilakukan.[1] Sebagian menfokuskan pada faktor-faktor dan penyebab kesenjangan, sebagian melihat kesenjangan antar regional. Resosudarmo dan Vidyattama (2006) dalam penelitian mereka menyatakan bahwa sejak awal tahun 1990, disparitas pendapatan per kapita di seluruh daerah di Indonesia telah menjadi topik penting. Sejak saat itu dan seterusnya, daerah yang tertinggal mulai menunjukkan ketidakpuasan mereka kepada pemerintah pusat dan menuntut transfer pendapatan dan kewenangan yang lebih besar dalam hal rencana pembangunan di daerah mereka (Resosudarmo, dkk., 2006).

Akita dkk (1999) meneliti mengenai faktor dan penyebab kesenjangan dalam distribusi pendapatan di Indonesia dengan menggunakan data Susenas tahun 1987, 1990 dan 1993. Mereka menggunakan teknik Theil dekomposisi dan menemukan bahwa kesenjangan didalam propinsi adalah faktor utama dan menyumbang sekitar 17 – 18% terhadap kesenjangan secara nasional, sehingga disarankan para pembuat kebijakan lebih fokus pada program pengurangan kesenjangan di dalam propinsi, dibanding antara propinsi. Kesenjangan antara Perkotaan dan pedesaan juga menjadi penyumbang tertinggi kesenjangan secara nasional. (Akita, 1999).

Seperti penelitian Akita dkk (1999), tulisan ini bermaksud untuk melihat kondisi kesenjangan pendapatan di Indonesia. Bedanya, data yang digunakan dalam tulisan ini adalah Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2008, 2011 dan 2013, sehingga didapat informasi terbaru tentang kondisi kesenjangan di Indonesia. Perbedaan lainnya dengan penelitian Akita dkk (1999), tulisan ini menjabarkan kondisi kesenjangan pendapatan di Indonesia dengan menggunakan 3 indeks kesenjangan. Kriteria Bank Dunia dan Koefisien Gini yang umum dipakai untuk melihat kesenjangan dan Theil indeks juga dipakai untuk mengkaji faktor-faktor penyumbang dari kesenjangan pendapatan di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan Akita dkk (1999) hanya menganalisis hasil dekomposisi theil indeks saja. Sementara, penelitian ini mengajikan juga hasil kesenjangan dengan menggunakan Kriteria Bank Dunia dan Koefisien Gini sebagai pelengkap dan perbandingan indeks kesenjangan.

Untuk mengkaji faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kesenjangan pendapatan di Indoensia, teknik yag digunakan dalam penelitian ini sama dengan Akita dkk (1999) yaitu teknik dekomposisi indeks Theil (*Theil Inequality Decomposition Technique*), dimana kesenjangan pendapatan dianalisa dengan menguraikan menjadi berbagai kategori, yaitu antar perkotaan dan pedesaan, kabupaten/kota, kelompok pendidikan, gender, kelompok usia dan jumlah anggota rumah tangga.

Sistematika penulisan disusun sebagai berikut: Pertama adalah pendahuluan yang didalamnya mencakup latar belakang, tujuan dan sistematika penulisan. Kedua, tinjauan pustaka yang menjabarkan kerangka konseptual dan menjelaskan konsep-konsep yang digunakan dalam tulisan ini. Bagian selanjutnya mendeskripsikan data dan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Berikutnya, pemaparan hasil olahan data, pembahasannya mengenai kesenjangan pendapatan. Bagian terakhir adalah kesimpulan dan saran.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Debraj Ray mengungkapkan konsep kesenjangan dengan "*how benefit of economy is distributed among people or region"* (Ray, 1998). Sementara Ravallion (2003) menyatakan bahwa "*inequality is about the disparities in levels of living".* Dia kemudian membedakan kesenjangan menjadi 'kesenjangan relatif' dan 'kesenjangan absolut'. Kesenjangan relatif tergantung dari rasio pendapatan individu terhadap rata-rata pendapatan secara keseluruhan. Sehingga, jika semua pendapatan naik dengan tingkat yang sama, maka kesenjangan relatif menjadi tidak berubah. Kesenjangan absolut merupakan pengukuran kesenjangan dengan menggunakan parameter dengan suatu nilai mutlak.

Pembahasan mengenai ketimpangan pendapatan menjadikan pembagian masyarakat menjadi kelompok-kelompok pendapatan. Beberapa analisis kesenjangan membagi masyarakat menjadi 10 kelompok desil, mulai dari 10 persen populasi berpendapatan terendah, 10 persen kelompok di atasnya, dan seterusnya sampai 10 persen kelompok berpenghasilan teratas. Sementara, sebagian analisis lain, seperti yang dilakukan Bank Dunia, membagi kelompok masyarakat mejadi 40 persen kelompok berpenghasilan terendah, 40 persen kelompok menengah dan 20 persen kelompok berpenghasilan teratas. Selain membagi masyarakat menjadi kelompok pendapatan, pengukuran kesenjangan juga

[1] Sebagai contoh,: Akita dan Lukman (1995), Garcia dan Soelistianingsih (1998), Resosudarmo dan Vidyattama (2006).

berbasiskan daerah sehingga kesenjangan pendapatan dapat dibandingankan antar daerah.

Di dalam melakukan analisa kesenjangan di suatu wilayah, kita memerlukan alat atau ukuran-ukuran yang dapat menimbang tingkat kesenjangan di suatu wilayah. Ada beberapa indeks yang diciptakan untuk mengukur kesenjangan di suatu wilayah, diantaranya Indeks Williamson, Atkinson, Gini Koefisien, Theil Indeks dan lain-lain, bahkan Bank Dunia menciptakan kriteria umum untuk membandingkan tingkat kesenjangan. Pada publikasi ini, digunakan 3 ukuran kesenjangan pendapatan yaitu Kriteria Bank Dunia, Gini Koefisien sebagai ukuran kesenjangan yang paling umum dipakai, selain itu digunakan Theil Indeks sebagai perbandingan, dikarenakan indeks Theil dapat digunakan untuk menganalisa kesenjangan dengan membaginya menjadi beberapa kelompok.

Sebuah indeks dianggap sebagai ukuran kesenjangan yang baik jika memenuhi beberapa kriteria, yaitu *anonymity, mean independence, population-size independence,* dan *the Pigue-Dalton principle of transfer* (Shorrocks, 1980). Dilihat dari kriteria-kriteria yang harus dimiliki indeks, Indeks Gini dan Indeks Theil memenuhi kriteria-kriteria sebagai indeks yang mengukur kesenjangan pendapatan di suatu daerah.

2.1 Kriteria Bank Dunia

Ukuran kesenjangan pendapatan kriteria Bank Dunia merupakan indikator untuk mengukur tingkat ketimpangan dengan memfokuskan pada berapa besar persentase yang diterima oleh 40 persen kelompok penduduk dengan penghasilan terendah terhadap seluruh pendapatan penduduk di suatu daerah. Indikator ini membagi penduduk menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Kelompok 40 persen penduduk *yang berpendapatan rendah;*
2. Kelompok 40 persen penduduk yang *berpendapatan menengah;* dan
3. Kelompok 20 persen penduduk yang *berpendapatan tinggi.*

Selanjutnya tingkat ketimpangan pendapatan penduduk menurut Bank Dunia terpusat pada kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok tersebut **lebih kecil dari 12 persen**, berarti tingkat ketimpangan sebaran pendapatan tergolong **"tinggi"**.
2. Bila kelompok tersebut **menerima 12 sampai 17 persen** dari total pendapatan, berarti tingkat ketimpangan sebaran pendapatan **"sedang"**.
3. Bila kelompok tersebut **menerima lebih dari 17 persen** dari total pendapatan, berarti tingkat ketimpangan sebaran pendapatan **"rendah"**.

2.2 Koefisien Gini dan Kurva Lorenz

Parameter lain yang sering digunakan untuk mengukur distribusi pendapatan ini adalah Angka *Gini Ratio* yang juga sering disebut *Indeks Gini* atau lengkapnya "*Gini Concentration Ratio*". Indeks Gini*/Gini Ratio* merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva lorenz dan aspek matematis.

Ukuran kesenjangan ini juga memenuhi *desirable property* dari ukuran kesenjangan, tetapi berbeda dengan Indeks Theil, Indeks Gini tidak dapat diuraikan menjadi bagian yang bisa dijumlahkan (*additively decomposable*). Angka *Gini Ratio* sebagai ukuran pemerataan pendapatan mempunyai selang nilai antara nilai 0 (nol) dan 1 (satu). *Gini Ratio* sama dengan 0 (nol) menunjukkan ketimpangan sebaran pendapatan yang rendah (pemerataan sempurna). Sedangkan, nilai 1 (satu) menunjukan tingkat ketimpangan sebaran yang tinggi (ketimpangan sempurna). Walaupun demikian, menurut Michael Todaro seorang ahli ekonomi pembangunan dari Italia menyebutkan bahwa:

1. *Gini Ratio* terletak antara 0,50 – 0,70 menandakan pemerataan sangat timpang.
2. Sedangkan apabila nilainya terletak antara 0,36 – 0,49 menunjukan ketimpangan sedang.
3. Sementara apabila terletak diantara 0,20 – 0,35 dinyatakan pemerataan relatif tinggi (merata).

Dalam hal ini, kenyataannya tidak mungkin suatu daerah/wilayah mempunyai angka gini ratio yang besarnya sama dengan 0 (nol) dan 1 (satu).

Secara visual, indeks Gini dapat dijelaskan dengan menggunakan kurva lorenz, yaitu kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pengeluaran) dengan distribusi seragam yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Grafik persentase kumulatif penduduk yang diurut dari termiskin ke terkaya digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran digambar pada sumbu vertikal. Indeks gini merupakan formula yang menghitung rasio luas bidang antara garis diagonal (*perfect equality*) dan kurva lorenz. Semakin jauh jarak kurva lorenz dengan garis diagonal, maka tingkat kesenjangannya semakin tinggi.

2.3 Theil Indeks

Di dalam literatur, Theil indeks termasuk ke dalam *Generalized enthropy class*. Indeks ini diangap memenuhi *desirable properties* sebagai ukuran kesenjangan yaitu *anonymity, mean independence, population-size independence,* dan *the Pigue-Dalton principle of transfer* (Shorrocks, 1980).

Anonymity menyiratkan bahwa ukuran kesenjangan seharusnya tidak tergantung pada siapa yang memiliki pengeluaran per kapita lebih tinggi atau lebih rendah. Ukuran tersebut tidak bergantung pada apa yang kita yakini sebagai manusia yang lebih baik, apakah itu orang kaya atau orang miskin.

Mean independence berarti bahwa ukuran ketidaksetaraan tetap tidak berubah ketika pengeluaran per kapita rumah tangga berubah dalam proporsi yang sama. *Population-size independence* berarti bahwa ukuran ketimpangan tetap tidak berubah bila jumlah rumah tangga pada setiap tingkat pengeluaran berubah dengan proporsi sama. *the Pigue-Dalton principle of transfer* menyiratkan bahwa dengan mengasumsikan semua pendapatan yang lain konstan, jika kita mentransfer sejumlah pendapatan dari orang kaya ke orang miskin, tetapi tidak sangat banyak sehingga mengakibatkan orang miskin itu menjadi lebih kaya daripada orang yang awalnya kaya tadi, maka akan dihasilkan distribusi pendapatan baru yang lebih merata.

3. DATA SURVEI SOSIAL EKONOMI (SUSENAS)

Penelitian ini menggunakan data pengeluaran konsumsi dari Survei Sosial Ekonomi (Susenas) tahun 2008, 2011 dan 2013. Pendekatan pengeluaran (*expenditure approach*) banyak digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan dikarenakan data konsumsi pengeluaran dikatakan lebih 'terpercaya' dari data pendapatan dan karakteristik dari data SUSENAS yang memiliki tingkat detilasi yang cukup tingi untuk variable pengeluaran dan tidak untuk data pendapatan.

Susenas adalah data sosial ekonomi nasional yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) secara periodik sejak tahun 1963. Jika dilihat dari sejarah perkembangan Susenas, pada awalnya survey ini hanya mencakup 5 provinsi di pulau Jawa dengan jumlah sampel hanya sebanyak 16.000 rumah tangga. Sejalan dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya data ini yang digunakan juga untuk menghitung data kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia, sejak tahun 1982 Susenas mencakup seluruh provinsi (termasuk Provinsi Timor Timur pada saat masih bergabung dengan Indonesia) dan jumlah sampelnya juga mengalami kenaikan tiap tahunnya. Tahun 1987, jumlah sampel sebesar 49.000, tahun 1993 sampelnya meningkat sebesar 65.000 rumah tangga, dan terakhir di tahun 2013 sampel Susenas mencapai 300.000 rumah tangga.

Sampai dengan tahun 2010, Susenas menggunakan 3 modul yang dilaksanakan setiap 3 tahun sekali, yaitu Modul Konsumsi, Modul Sosial Budaya dan Pendidikan, serta Modul Perumahan dan Kesehatan. Mulai tahun 2011, pengumpulan data konsumsi dilaksanakan secara triwulan setiap tahun. Selain modul, Susenas juga mengumpulkan data KOR. Susenas KOR dilaksanakan setiap tahun untuk mengumpulkan data individu dan rumah tangga mengenai kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan juga pengeluaran.

Pada penelitian ini, variabel yang dipakai untuk mengukur tingkat kesenjangan pendapatan di Indonesia adalah data pengeluaran konsumsi per kapita tahun 2008, 2011 dan 2013. Jenis pengeluaran yang dicakup di dalam data pengeluaran konsumsi di klasifikasikan ke dalam kelompok makanan dan non-makanan. Konsumsi pengeluaran juga merekam apakah konsumsi itu melalui pembelian, produksi sendiri atau pemberian dari pihak lain. Barang dan jasa yang bersumber dari produksi sendiri ataupun dari pihak lain direkam dengan mengimputasi nilai barang/jasa tersebut. Selain data konsumsi per kapita, digunakan juga beberapa variabel sosial ekonomi rumah tangga dalam analisa penelitian ini, seperti tingkat pendidikan, jenis kelamin, umur dari kepala rumah tangga serta banyaknya anggota rumah tangga.

4. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan Koefisien Gini, Theil T dan Theil L untuk mengukur kesenjangan pengeluaran dikarenakan ketiga indeks ini memenuhi kriteria dari standar yang baik dari sebuah ukuran kesenjangan, yaitu *mean independence*, *population size independence* dan prinsip Pigou-Dalton. Metode yang dipakai adalah Teknik Dekomposisi Kesenjangan Theil (*Theil inequlity decomposition technique*) dimana kesenjangan didekomposisikan dengan sub kelompok-kelompok populasi.

Anggap bahwa terdapat sejumlah "n" rumah tangga dalam suatu sampel dan mereka disusun dari terkecil ke terbesar berdasarkan pengeluaran perkapita yaitu $y_1 \leq y_2 \leq \ldots \leq y_n$. Maka, **Koefisien Gini** didefinisikan sebagai:

$$KG = 1 - \sum_{i=1}^{n} (P_i - P_{i-1})(Y_i - Y_{i-1})$$

Dimana : Pi = Proporsi kumulatif dari penerima pendapatan i
Yi = Proporsi kumulatif pengeluaran perkapita i
n = Jumlah observasi

Indeks Theil T dan L mengukur kesenjangan pengeluaran perkapita dalam distribusi rumah tangga karena Indeks ini membandingkan *share* pengeluaran dan populasi untuk seluruh rumah tangga. Yang menjadi perbedaan, Theil T menggunakan *share* pengeluaran sebagai penimbang, sementara Theil L menggunakan *share* populasi.

Dianggap "n" rumah tangga dalam populasi diklasfikasikan menjadi "m" kelompok sosial ekonomi yang *mutually exclusive* dan *collectively exhaustive*, maka **Indeks T dan Indeks L** didapat dari:

$$T = \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n_i}\left(\frac{y_{ij}}{Y}\right)\log\left(\frac{y_{ij}/Y}{1/n}\right) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n_i}\left(\frac{y_{ij}}{\mu}\right)\log\left(\frac{y_{ij}}{\mu}\right) \quad (1)$$

$$L = \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n_i}\left(\frac{1}{n}\right)\log\left(\frac{1/n}{y_{ij}/Y}\right) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n_i}\left(\frac{y_{ij}}{\mu}\right)\log\left(\frac{\mu}{y_{ij}}\right) \quad (2)$$

y_{ij} = pengeluaran perkapita dari rumahtangga j dalam kelompok ke-i (i=1, 2,..., m; j=1,2,...,n_i) n_i = jumlah

rumahtangga dalam kelompok *i* (i=1,2,…,m); $Y\left(=\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n_i} y_{ij}\right)$ = total pengeluaran seluruh rumahtangga $\mu\left(=\frac{Y}{n}\right)$ = rata-rata (per kapita) pengeluaran seluruh rumah tangga.

Rumus (1) dan (2) dibagi ke dalam komponen *within-sector* dan *between-sector* menjadi:

$$T=\sum_{i=1}^{m}\left(\frac{Y_i}{Y}\right)T_i+\sum_{i=1}^{m}\left(\frac{Y_i}{Y}\right)\log\left(\frac{Y_i/Y}{n_i/n}\right)=T_W+T_B \quad (3)$$

$$L=\sum_{j=1}^{n_i}\left(\frac{n_i}{n}\right)L_i+\sum_{i=1}^{m}\left(\frac{n_i}{n}\right)\log\left(\frac{n_i/n}{Y_i/Y}\right)=L_W+L_B \quad (4)$$

5. HASIL DAN TEMUAN PENELITIAN

Di Indonesia, masalah konsekuensi distribusi dari pertumbuhan ekonomi menjadi isu utama. Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi mulai banyak dipertanyakan banyak kalangan, apakah hal itu dinikmati sebagian besar masyarakat atau hanya sekelompok masyarakat saja. Bahkan tidak sedikit orang yang mensinyalir bahwa pembangunan selama ini malah menciptakan kesenjangan yang semakin lebar di dalam masyarakat.

Mengurangi kesenjangan antar daerah telah menjadi salah satu isu kebijakan utama di Indonesia. Pemerintah telah berusaha untuk mengurangi ketimpangan melalui program-program pembangunan. Misalnya, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Mandiri), percepatan daerah tertinggal, daerah perbatasan, daerah konflik, daerah pasca bencana dan puncaknya pada tahun 2011, Indonesia meluncurkan MP3IE (Masterplan Percepatan dan Perluasaan Ekonomi Indonesia) yang mengandung butir-butir yang ditargetkan akan dicapai Indonesia hingga tahun 2025.

Analisis keberhasilan pembangunan ekonomi tidak cukup terhenti pada tinggi/rendahnya pertumbuhan ekonomi. Bagaimanapun, perlu dikaji lebih jauh apakah hasil pembangunan ekonomi bisa dinikmati dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk itulah pentingnya mengukur tingkat pemerataan pendapatan. Sebelum sampai pada pembahasan analisis dekomposisi kesenjangan, akan dibahas kesejangan menggunakan kriteria Bank Dunia. Dilanjutkan dengan pembahasan menggunakan Koefisien Gini dan terakhir pembahasan Teknik Dekomposisi Theil.

5.1 Kesenjangan Berdasarkan Kriteria Bank Dunia dan Koefisien Gini

Bank Dunia mempunyai kriteria dalam menentukan tingkat ketimpangan pendapatan di suatu daerah, dimana fokus perhatian dari penggunaan kriteria ini adalah pada kelompok 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah. Tingkat kesenjangan pendapatan di suatu daerah dikatakan tinggi jika di daerah tersebut kelompok 40 persen berpendapatan terendahnya menerima lebih kecil dari 12 persen dari total pendapatan, dikatakan sedang jika kelompok ini proporsinya menerima antara 12 sampai 17 persen, dan dikatakan rendah jika kelompok ini menerima lebih dari 17 persen dari total penerimaan.

Secara umum, tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia jika diukur dengan menggunakan kriteria Bank Dunia termasuk ke dalam kategori ketimpangan rendah. Walaupun demikian, kondisi kesenjangan ini hanya sedikit berada di atas ambang batas kategori. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan yang masuk kategori rendah pada tahun 2013 masih perlu diwaspadai karena masih rentan masuk dalam kategori sedang/menengah. Pemerintah masih harus terus memacu kinerjanya untuk terus dapat meningkatkan pemerataan pendapatan penduduk, karena kontribusi pengeluaran kelompok 40 % penduduk berpendapatan terendahnya hanya sedikit di atas 17 persen.

Melihat perubahan 5 tahun terakhir ini, pada tahun 2008, 40 persen penduduk dengan penghasilan terendah masih menerima sekitar 18.91 persen dari total pegeluaran penduduk Indonesia. Tahun 2011, kondisi memburuk sehingga hanya mendapat sekitar 17.65 persen dan 2 tahun berikutnya kondisi terus memburuk dengan menurun menjadi 17.30 persen.

Hal lain yang dapat diamati dari hasil perhitungan kriteria Bank Dunia tersebut adalah kontribusi pengeluaran penduduk pada kelompok 20 persen penduduk berpenghasilan teratas melebihi dua kali lipat dari 40 persen penduduk dengan penghasilan terendah. Tabel 1 menjelaskan dominasi kelompok penduduk 20 % pengeluaran teratas masih sangat tinggi selama lima tahun terakhir. Penerimaan golongan ini dalam 5 tahun terus mengalami kenaikkan dari yang menguasai 43.91 persen di tahun 2008, menjadi menguasai 47.99 persen dari total penerimaan masyarakat Indonesia.

Selain dari Kriteria Bank Dunia, banyak kalangan juga memperhatikan ketimpangan yang terjadi di masyarakat dengan membandingkan proporsi pengeluaran kelompok berdasarkan quantil dan kelompok desil, dimana pengelompokkan quantil membagi habis per 20 persen masyarakat dan desil membagi habis masyarakat menjadi kelompok per 10 persen. Tabel 2 memaparkan andil atau kontribusi pengeluaran per kapita dari masyarakat Indonesia tahun 2008, 2011 dan 2013. Dari tabel tersebut kita dapat melihat kontribusi pengeluaran dari 20 persen penduduk golongan pendapatan terbawah di Indonesia mengalami penurunan dari 7,15 persen pada tahun 2008 menjadi 7.11 persen pada tahun 2011. Pada tahun 2013 kontribusi dari golongan ini mengalami penurunan kembali menjadi 7,03 persen. Kebalikkannya, kontribusi yang diberikan oleh 20 persen golongan pengeluaran teratas justru mengalami kenaikan dari tahun 2008 mencapai 43.91 persen menjadi 46.94 persen di tahun 2011 dan

kemudian meningkat kembali di tahun 2013 menjadi 47.90 persen.

Dari tabel 2 juga kita dapati bahwa rasio 20 persen golongan teratas terhadap 20 persen penduduk golongan terbawah (T20/B20) penduduk Indonesia tahun 2008 sebesar 6,01. Rasio tersebut meningkat sebesar 0,5 persen menjadi sebesar 6,6 pada tahun 2011 dan kemudian di tahun 2013 rasio kelompok ini menjadi 6,8.

Indeks Gini merupakan ukuran yang paling umum digunakan untuk menganalisis tingkat kesenjangan di suatu daerah. Menurut Michael Todaro, seorang ahli ekonomi pembangunan dari Italia, bahwa nilai Gini Ratio yang terletak antara 0,50–0,70 menandakan pemerataan yang sangat timpang. Sedangkan, apabila nilainya terletak antara 0,36–0,49 menunjukan ketimpangan sedang. Sementara, apabila nilai Gini terletak diantara 0,20–0,35 dinyatakan pemerataan relatif tinggi (merata). Dalam hal ini, kenyataannya tidak mungkin suatu daerah/wilayah mempunyai angka *gini ratio* yang besarnya sama dengan 0 (nol) dan 1 (satu).

Berdasarkan koefisien gini, kesenjangan pendapatan di Indonesia secara umum termasuk dalam kategori ketimpangan sedang. Akan tetapi, meskipun masih dalam kategori kesenjangan sedang, kecenderungannya 10 tahun terakhir ini menunjukkan tingkat kesenjangan yang semakin meningkat (Gambar 2). Sebelum tahun 2005, tingkat kesenjangan di Indonesia masih berada pada kategori kesenjangan rendah, setelah tahun itu kondisi kesenjangan semakin memburuk dengan memasuki tingkat kesenjangan menengah, dan terus mengalami kenaikkan sehingga pada tahun 2013 Gini Indeks sudah berada pada kondisi 0,41.

5.2 Dekomposisi Kesenjangan Pendapatan

5.2.1 Dekomposisi berdasarkan lokasi (Perkotaan-Pedesaan)

Sesuai dengan penelitian-penelitian sebelumnya, rata-rata pengeluaran per kapita rumah tangga di perkotaan jauh lebih besar dibanding dengan wilayah pedesaan, dengan rasio sekitar 1,7. Rata-rata pengeluaran per kapita rumah tangga per bulan di perkotaan tahun 2013 sebesar Rp901.000,00 naik sebesar 24 persen dari tahun 2011. Sementara itu, rata-rata pengeluaran per kapita rumah tangga di pedesaan tahun 2013 hanya sebesar Rp526.000,00, walaupun juga mengalami kenaikan dari tahun 2011 tapi tidak sebesar kenaikan di daerah perkotaan.

Dari tabel 3, diketahui bahwa persentase rumah tangga yang tinggal di perkotaan terus mengalami kenaikan. Tahun 2008, proporsi rumah tangga yang tinggal di perkotaan sebesar 48,31 persen dan mengalami kenaikan menjadi 49,80 persen di tahun 2011, dan kemudian mengalami kenaikan kembali di tahun 2013 menjadi 50,11 persen. Konsekuensinya, rumah tangga yang tinggal di daerah pedesaan terus mengalami penurunan. Tahun 2008, proporsi yang tinggal di pedesaan masih lebih banyak dibanding yang tinggal di perkotaan (51,69%). Pada tahun 2011, proporsinya hampir seimbang antara yang tinggal di pedesaan dengan yang tinggal di perkotaan. Pada tahun 2013, terlihat bahwa mereka yang tinggal di pedesaan menjadi lebih sedikit dengan mereka yang tinggal di perkotaan.

Dari penelitian Akita dkk (1999), pada tahun 1987, proporsi rumah tangga yang tinggal di perkotaan hanya mencapai seperempat dari total jumlah penduduk Indonesia dan pada tahun 1993 proporsi rumah tangga yang tinggal di perkotaan mencapai 32,1 persen.

Berdasarkan klasifikasi daerah tempat tinggal, baik berdasarkan nilai indeks Gini, Theil L maupun Theil T, penduduk di daerah pedesaan menunjukkan kesenjangan yang lebih rendah (merata), sedangkan penduduk di daerah perkotaan mengindikasikan kondisi sebaliknya. Berdasarkan nilai indeks Gini, kesenjangan di perkotaan sejak tahun 2008 telah berada dalam kategori kesenjangan sedang, dan kondisinya terus mengalami kenaikan, dari 0,369 di tahun 2008 menjadi 0,402 pada tahun 2011, dan mengalami kenaikkan kembali menjadi 0,419 di tahun 2013. Indeks Gini daerah pedesaan mengindikasikan masih berada pada taraf kesenjangan rendah.

Ketimpangan pendapatan yang lebih besar di wilayah perkotaan dibanding pedesaan, dikombinasi dengan pergeseran rumah tangga dari pedesaan ke perkotaan, menyebabkan kontribusi/andil ketimpangan di perkotaan sangat tinggi terhadap total ketimpangan. Tahun 2008, andil kesenjangan perkotaan menyumbang lebih dari 62,8 persen (Theil T) terhadap total kesenjangan secara total. Tahun 2011, kesenjangan perkotaan memberikan andil sebesar 64,2 persen terhadap total kesenjangan di Indonesia, dan mengalami kenaikan kembali menjadi 66 persen di tahun 2013. Sementara itu, andil kesenjangan pedesaan terhadap total kesenjangan berada di kisaran 25 persen.

Tingginya andil kesenjangan perkotaan mengisyaratkan bahwa kesenjangan pendapatan di perkotaan merupakan faktor dominan sebagai penyumbang kesenjangan pendapatan secara total di Indonesia. Jika dibandingkan dengan tahun 1987, 1990, dan 1993, dimana hasil peneltian Akita dkk (1999) menemukan bahwa andil kesenjangan di perkotaan terhadap total kesenjangan di Indonesia masih berada pada kisaran 37-45 persen.

Berdasarkan penelitian mengenai kesenjangan di Indonesia yang dilakukan oleh Akita dkk (1999), menyimpulkan bahwa kesenjangan antar pedesaan dan perkotaan di Indonesia menyumbang proporsi yang cukup besar (22 sampai 24 persen) terhadap kesenjangan nasional, sehingga disarankan untuk mengurangi kesenjangan antara pedesaan dan perkotaan ini sebagai salah satu prioritas utama program Pemerintah Indonesia.

Dari kurun waktu penelitian yang dilakukan Akita dkk (1999) sampai tahun 2008, Indonesia telah dapat mengurangi andil kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan. Tahun 2008, kesenjangan antar perkotaan dan pedesaan hanya menyumbang sekitar

13 persen terhadap kesenjangan nasional dan kemudian andil itu semakin menurun di tahun 2011 dan tahun 2013 menjadi hanya sekitar 10 persen.

5.2.2 Dekomposisi Berdasarkan Pulau dan Provinsi

Indonesia adalah negara yang terdiri dari banyak pulau. Isu kesenjangan juga banyak disuarakan berkaiatan dengan Jawa dan Luar Jawa atau Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Pembangunan ekonomi disinyalir lebih banyak dominan di pulau Jawa dan meninggalkan pulau lain terlantar. Begitu pula dengan isu KBI dan KTI, dimana pembangunan di KBI terasa lebih maju dibandingkan di KTI. Pada bagian ini, kesenjangan dianalisis berdasarkan provinsi dan pulau terbesar.

Berdasarkan indeks gini, secara umum pada tahun 2013 tingkat kesenjangan mayoritas provinsi-provinsi di Indonesia telah berada pada kriteria kesenjangan sedang/menengah. Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua adalah 3 provinsi dengan nilai Indeks Gini tertinggi di Indonesia dengan nilai masing-masing 0,442; 0,433; dan 0,427. Sedangkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Aceh, dan Provinsi Maluku Utara adalah provinsi dengan Indeks Gini terendah dengan nilai masing-masing 0,303; 0,313; dan 0,315.

Kesenjangan antar provinsi menyumbang sekitar 11 persen terhadap kesenjangan total di Indonesia (Theil T). Kondisi ini lebih baik jika dibanding dengan 5 tahun sebelumnya, dimana kesenjangan antar provinsi masih menyumbang sekitar 14,3 persen terhadap total kesenjangan di Indonesia. Yang harus menjadi perhatian utama pemerintah, terutama pemeritah daerah adalah kesenjangan di dalam provinsi, dimana pada tahun 2013 kesenjangan intra provinsi menyumbang 89 persen terhadap kesenjangan nasional, sehingga sangat penting mengedepankan program-program pemerataan pembangunan antar daerah di dalam provinsi.

5.2.3 Dekomposisi Berdasarkan Kategori Pendidikan

Pendidikan sering dianggap sebagai salah satu faktor utama penyebab kesenjangan pendapatan karena tingkat produktifitas seseorang ditentukan dari tingkat pengetahuan dan juga *skill* yang mereka miliki, dan untuk mendapatkannya adalah dengan menempuh jalur pendidikan. Pada penelitian ini, pendidikan dari kepala rumah tangga dibagi menjadi beberapa ketegori, yaitu: (1) Tidak bersekolah atau tidak lulus Sekolah Dasar, (2) Sekolah Dasar, (3) Sekolah Menengah Pertama, (4) Sekolah Menengah Atas, (5) Diploma I/II, (6) Diploma III, (7) Diploma IV atau S1, dan (8) Master dan Doktor.

Tabel 6 menjabarkan rata-rata pengeluaran per kapita rumah tangga, rasio pengeluaran rumah tangga di daerah perkotaan terhadap pedesaan dan persentase jumlah rumah tangga perkotaan di Indonesia berdasarkan pendidikan dari kepala rumah tangganya. Dari Tabel 6, terlihat dengan jelas hubungan antara pendidikan kepala rumah tangga dan pengeluaran rata-rata per kapitanya, dimana rata-rata pengeluaran perkapita rumah tangga meningkat sejalan dengan semakin tingginya tingkat pendidikan kepala rumah tangganya. Rata-rata pengeluaran perkapita rumah tangga dengan tingkat pendidikan jenjang universitas, 3 sampai 5 kali lebih besar dibanding dengan mereka yang tidak pernah bersekolah/tidak menamatkan sekolah dasar dan mereka yang hanya menamatkan pendidikan sekolah dasar.

Rasio rata-rata pengeluaran perkapita rumah tangga antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan cenderung sama di semua kelompok pendidikan dengan kisaran antara 1,2 sampai 1,9. Hal tersebut mengindikasikan bahwa lokasi dan pendidikan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap rata-rata pengeluaran. Rumah tangga yang kepala rumah tangga berpendidikan tinggi relatif memiliki pengeluaran yang tinggi pula, baik itu di daerah perkotaan ataupun di daerah pedesaan.

Dari tabel di atas, diketahui bahwa semakin tinggi pendidikan kepala rumah tangga memiliki kencenderungan untuk tinggal di daerah perkotaan. Pada tahun 2013, sebanyak 81,3 persen dari kepala rumah tangga yang menamatkan pendidikan S1 tinggal di perkotaan dan sebanyak 89,6 persen dari kepala rumah tangga yang menamatkan pendidikan S2/S3 tinggal di perkotaan. Sementara, kepala rumah tangga yang berpendidikan sekolah dasar mayoritas tinggal di pedesaan dengan persentase hampir 60 persen, begitu juga kepala rumah tangga yang tidak pernah mengenyam pendidikan/tidak lulus sekolah dasar hampir duapertiganya tinggal di pedesaan.

Tabel 7 menjabarkan nilai indeks gini dan hasil dari Theil dekomposisi dengan berdasarkan kategori pendidikan. Dari nilai indeks gini maupun theil, kita ketahui semakin tinggi kelompok pendidikan, semakin besarnya nilai indeks kesenjangannya dan tren selama 5 tahun, dari tahun 2008 sampai 2013, indeks kesenjangannya semakin meningkat. Hal lain yang dapat kita ketahui dari tabel di atas bahwa indeks gini dari kelompok mereka yang tidak tamat sekolah dasar, hanya menamatkan sekolah dasar, maupun yang menamatkan sampai SMP masih masuk ke dalam kategori kesenjangan rendah dengan nilai gini antara 0,315 sampai 0,343 di tahun 2013. Sementara, kelompok pendidikan dari SMA ke atas telah masuk dalam kategori kesenjangan sedang.

Berdasarkan Theil, kesenjangan antar kelompok pendidikan menyumbang sekitar 26 sampai 28 persen (jika menggunakan Theil T) terhadap total kesenjangan di Indonesia. Hal ini menyimpulkan bahwa dengan meningkatkan kesempatan pendidikan terhadap masyarakat Indonesia secara signifikan dapat mengurangi kesenjangan pendapatan secara total di Indonesia. Dari penelitian Akita dkk (1999) yang meneliti kesenjangan di Indonesia tahun 1987, 1990 dan 1993 menemukan bahwa kesenjangan antara

kelompok pendidikan menyumbang 30 sampai 33 persen terhadap total kesenjangan di Indonesia.

Untuk menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan, pemerintah harus memprioritaskan pengurangan kesenjangan pendidikan. Proporsi kepala rumah tangga yang tidak pernah bersekolah dan tidak sampai menamatkan sekolah dasarnya masih cukup tinggi, sehingga memberi kesempatan yang luas bagi penduduknya untuk mengenyam pendidikan umum signifikan dalam mengurangi kesenjangan pendapatan di Indonesia.

5.2.4 Dekomposisi Berdasarkan Kategori Jenis Kelamin

Tabel 8 menginformasikan rata-rata pengeluaran perkapita kepala rumah tangga berdasarkan jenis kelamin di Indonesia. Rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dengan kepala rumah tangga perempuan lebih besar dibanding dengan kepala rumah tangga laki-laki, walaupun dengan perbandingan yang tidak terlalu besar.

Dari *between-group inequality* dapat disimpulkan bahwa kesenjangan gender bukanlah faktor terpenting dari kesenjangan secara keseluruhan. B*etween-group inequality* hanya menyumbang tidak lebih dari 1 persen terhadap total kesenjangan di Indonesia, sehingga menurunkan kesenjangan gender hanya akan sedikit pengaruhnya dalam menurunkan total kesenjangan pendapatan di Indonesia.

5.2.5 Dekomposisi Berdasarkan Kategori Jumlah Anggota Rumah Tangga

Semakin banyak jumlah anggota rumah tangga, cenderung menyebabkan semakin besar pula pengeluaran rumah tangga, tetapi pengeluaran "perkapita" rumah tangga semakin menurun sejalan dengan semakin banyaknya jumlah anggota rumah tangga. Pola ini sepertinya berlaku untuk Indonesia. Dari tabel 10, tergambar bahwa pada tahun 2013 pengeluaran perkapita sebesar Rp1.410.000,00 untuk rumah tangga dengan anggota rumah tangga berjumlah 1 orang, tetapi secara perlahan pengeluaran perkapita menurun menjadi Rp.525.000,00 untuk rumah tangga dengan 9 orang anggota rumah tangga. Dari Tabel 11 dapat disimpulkan bahwa banyaknya kesenjangan pendapatan antar kelompok anggota rumah tangga bukan faktor signifikan penyumbang dari kesenjangan pendapatan secara total di Indonesia.

5.2.6 Dekomposisi Berdasarkan Kategori Kelompok Usia

Dari Tabel 12 diketahui bahwa rumah tangga yang berusia sampai 24 tahun mayoritas berada/tinggal di daerah perkotaan. Persentase ini jika dilihat selama kurun waktu 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Sementara itu, kelompok usia di atas 65 tahun lebih banyak berdomisili di pedesaan. Hal ini berhubungan dengan masa pensiun dimana sebagian orang lebih memilih menghabiskan masa pensiunnya di kampung halaman sehingga menjadikan proporsi dari kelompok usia ini lebih dominan berada di pedesaan. Dari hasil dekomposisi, diketahui bahwa kesenjangan antar kelompok umur bukan merupakan faktor yang dominan dengan andil hanya menyumbang sekitar 0,7 persen (Theil T).

6. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Publikasi ini berusaha menyajikan gambaran terkini mengenai kesenjangan pendapatan di Indonesia dengan menggunakan data SUSENAS tahun 2008, 2011 dan 2013. Tiga ukuran kesenjangan digunakan di dalam peneitian ini, yaitu kriteria Bank Dunia, Koefisien Gini dan Theil Indeks dalam menganalisis kesenjangan pendapatan di Indonesia baik secara umum maupun antar wilayah di dalamnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia selama periode 5 tahun termasuk dalam kategori kesenjangan rendah berdasarkan kriteria Bank Dunia dan termasuk kategori kesenjangan sedang berdasarkan Gini Indeks.

Indeks kesenjangan pendapatan Indonesia walaupun menunjukkan kesenjangan yang sedang tetapi menunjukkan kecenderungan naik dalam 10 tahun belakang ini. Pemerintah harus lebih serius dalam pengurangan kesenjangan pendapatan karena jika tidak ditangani serius maka dikhawatirkan kesenjangan di masyakat akan lebih parah. Kebijakan yang diambil pemerintah daerah harus lebih memprioritaskan golongan masyarakat yang kurang tersentuh dari hasil-hasil pembangunan.

Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua adalah 3 provinsi dengan nilai Indeks Gini tertinggi di Indonesia dengan nilai masing-masing 0,442; 0,433; dan 0,427. Sedangkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Aceh dan Provinsi Maluku Utara adalah provinsi dengan Indeks Gini terendah dengan nilai masing-masing 0,303; 0,313; dan 0,315.

Kesenjangan antar provinsi menyumbang sekitar 11 persen terhadap kesenjangan total di Indonesia (Theil T). Kondisi ini lebih baik jika dibanding dengan 5 tahun sebelumnya. Yang harus menjadi perhatian utama pemerintah adalah kesenjangan di dalam provinsi. Potensi ekonomi, ketersedian infrasturktur, dan keuangan daerah yang tidak sama antara kabupaten/kota harus menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam perencanaan pembangunan sehingga tidak ada lagi aktifitas ekonomi yang hanya terkonsentrasi di beberapa wilayah tertentu saja, dengan membiarkan daerah lainnya tertinggal. Perencanaan yang bersifat spasial dan mempertimbangkan dimensi regional sangat perlu diperhatikan.

Kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan tahun 2008 menyumbang sekitar 13 persen dan kemudian semakin turun di tahun 2011 dan tahun 2013 menjadi hanya sekitar 10 persen sehingga pembuat kebijakan harus lebih memfokuskan pada penurunan kesenjangan di dalam masing-masing wilayah, dibanding kesenjangan antara pedesaan dan perkotaan.

Berdasarkan kategori pendidikan, kesenjangan antar kategori pendidikan (*between-group*) menyumbang sekitar 26 sampai 28 persen (jika menggunakan Theil T) terhadap total kesenjangan di Indonesia. Untuk menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan, pemerintah harus memprioritaskan pengurangan kesenjangan pendidikan. Proporsi kepala rumah tangga yang tidak pernah bersekolah dan tidak sampai menamatkan sekolah dasarnya masih cukup tinggi di Indonesia sehingga memberi kesempatan yang luas bagi penduduknya untuk mengenyam pendidikan umum akan signifikan dalam mengurangi kesenjangan pendapatan di Indonesia.

Dari hasil dekomposisi kesenjangan, dapat disimpulkan bahwa kesenjangan gender, kesenjangan antara anggota rumahtangga, dan kesenjangan antara kelompok usia bukanlah faktor terpenting dari kesenjangan secara keseluruhan. B*etween-group inequality* dari masing-masing kelompok itu hanya menyumbang tidak lebih dari 1 persen terhadap total kesenjangan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Anand, S., 1983. *Inequality and Poverty in Malaysia: Measurement and Decomposition*. World Bank Research Publication, New York: Oxford University Press.

Ray, Debraj., 1998. *Development Economics*. New Jersey: Princeton University Press.

Todaro, MP. dan Smith, SC., 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia* Ketiga Edisi Kedelapan, Jakarta: Penerbit Erlangga.

Jurnal

Akita, T., and Miyata, S., 2008. *Urbanization, educational expansion and expenditure inequality in Indonesia in 1996, 1999 and 2002*. Journal of the Asia Pacific Economy 13 (2), 147-167.

Kuznets, S., 1955. *Economic growth and income inequality*. American Economic Review 45, 1-28.

Shorrocks, A., 1980. *The class of additively decomposable inequality measures*. Econometrica, 48(3), pp. 613–25.

Ravallion, Martin,. 2003. *The Debate on Globalization, Poverty and Inequality: Why Measurement Matters.* International Affairs Vol. 79, No. 4: 739-753.

Salim, Emil,. 1976. *Perencanaan Pembangunan dan Perataan Pembangunan, Speech* in Dies Natalis of University of Indonesia: 1-40.

Williamson, J.G,. 1965. *Regional inequality and the process of national development: a description of the patterns*. Economic Development *and Cultural Change* 13(4), 1-84.

Karya Ilmiah

Akita, T,. 2012. *Inequality and poverty measurement.* Hand out lecture of Inequality and Poverty Course. International University of Japan. Fall Term 2012.

Nuraliyah. 2009. *Dekomposisi Ketimpangan Pendapatan di Indonesia Pasca Krisis (Tahun 1999-2005)*. Skripsi. Tidak Diplubikasikan. Institut Pertanian Bogor.

Naskah dari Internet

Anonymous, 2003. UU20-2003. http://www.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2012/10/UU20-2003-Sisdiknas.pdf. Diakses tanggal 18 januari 2017.

Anonymous.http://indonesia.go.id/in/kementerian/kementerian/kementerian-pendidikan-dan-kebudayaan/936-pendidikan/11591-wajib-belajar-9-tahun-sudah-tuntas.html. Diakses tanggal 18 januari 2017.

Anonymous.http://blog.tp.ac.id/paradigma-pendidikan-masa-depan. Diakses tanggal 18 januari 2017.

Anonymous.http://simple.wikipedia.org/wiki/File:Indonesia_provinces_location_map-en.svg. Diakses tanggal 18 januari 2017.

LAMPIRAN

Tabel 1: Gambaran Umum Kesenjangan Pendapatan di Indonesia Berdasarkan Kriteria Bank Dunia 2008, 2011 dan 2013

Kriteria Bank Dunia	2008	2011	2013
40 Persen Kelompok Pendapatan Terendah	18.91	17.65	17.30
40 Persen Kelompok Pendapatan Menengah	37.17	35.42	34.71
20 Persen Kelompok Pendapatan Teratas	43.91	46.94	47.99

Sumber: SUSENAS 2008, 2011 dan 2013 (diolah)

Tabel 2: Andil Pengeluaran per Kapita Rumahtangga (% dari total)

Tahun	Kuantil						Desil	
	1	2	3	4	5	T20/B20	1	10
1999	8.57	12.19	15.86	21.36	41.96	4.90	3.70	27.08
2002	7.71	11.24	14.84	20.85	45.10	5.85	3.33	30.07
2005	6.85	10.40	14.10	20.40	48.45	7.07	2.86	33.30
2008	7.15	11.76	15.59	21.58	43.91	6.1	2.88	28.99
2011	7.11	10.54	14.53	20.89	46.94	6.6	3.05	31.7
2013	7.03	10.27	14.15	20.56	47.98	6.8	3.02	32.63

Sumber: SUSENAS 2008, 2011, 2013 (diolah)
Catatan: T20/B20 adalah rasio dari andil pengeluaran untuk 20 persen golongan teratas terhadap 20 persen golongan terbawah

Tabel 3: Rata-rata Pengeluaran per Kapita Rumahtangga per Bulan Berdasarkan Kategori Perkotaan dan Pedesaan

Lokasi	Rata-rata Pengeluaran (Rp)			Jumlah Rumahtangga (%)		
	2008	2011	2013	2008	2011	2013
Perkotaan (K)	554,000	728,000	901,000	48.31	49.80	50.11
Perdesaan (D)	327,000	437,000	526,000	51.69	50.21	49.90
Total	436,718	581,635	713,882	100	100	100
Rasio (K/D)	1.69	1.67	1.71			

Sumber: SUSENAS 2008, 2011, 2013 (diolah)

Tabel 4: Dekomposisi Kesenjangan Berdasaran Lokasi (Perkotaan-Pedesaan)

Lokasi	Theil L			Theil T			Indeks Gini		
	2008	2011	2013	2008	2011	2013	2008	2011	2013
Perkotaan	0.228	0.265	0.287	0.260	0.319	0.337	0.369	0.402	0.419
Andil (%)	(50.3)	(52.4)	(54.6)	(62.8)	(64.2)	(66.0)			
Pedesaan	0.144	0.175	0.168	0.156	0.210	0.204	0.292	0.328	0.321
Andil (%)	(34.0)	(34.8)	(31.8)	(23.9)	(25.6)	(23.2)			
Total	0.219	0.252	0.264	0.254	0.310	0.323	0.362	0.393	0.402
Intra Kelompok	0.185	0.220	0.228	0.220	0.278	0.288			
Andil (%)	(84.4)	(87.2)	(86.4)	(86.7)	(89.8)	(89.2)			
Antar Kelompok	0.034	0.032	0.036	0.034	0.032	0.035			
Andil (%)	(15.6)	(12.8)	(13.6)	(13.3)	(10.2)	(10.8)			

Sumber: SUSENAS 2008, 2011, 2013 (diolah)

Tabel 5: Dekomposisi Kesenjangan Pendapatan Berdasarkan Pulau dan Provinsi

Pulau/Provinsi	Theil L			Theil T			Gini		
	2008	2011	2013	2008	2011	2013	2008	2011	2013
Sumatera	**0.166**	**0.200**	**0.210**	**0.184**	**0.244**	**0.258**	**0.314**	**0.350**	**0.359**
Aceh	0.153	0.158	0.159	0.166	0.200	0.193	0.304	0.310	0.313
Sumatera Utara	0.161	0.165	0.183	0.187	0.192	0.225	0.312	0.318	0.334
Sumatera Barat	0.142	0.177	0.186	0.156	0.219	0.231	0.291	0.329	0.338
Riau	0.157	0.199	0.222	0.170	0.235	0.273	0.302	0.349	0.370
Jambi	0.125	0.189	0.181	0.141	0.237	0.221	0.267	0.339	0.334
Sumatera Selatan	0.149	0.222	0.226	0.166	0.282	0.281	0.293	0.368	0.373
Bengkulu	0.131	0.236	0.228	0.127	0.327	0.289	0.266	0.379	0.374
Lampung	0.193	0.196	0.205	0.223	0.253	0.267	0.339	0.345	0.354
Kepulauan Bangka Belitung	0.100	0.152	0.152	0.112	0.173	0.195	0.235	0.307	0.303
Kepulauan Riau	0.130	0.213	0.213	0.139	0.246	0.230	0.276	0.362	0.362
Jawa-Bali	**0.238**	**0.271**	**0.282**	**0.284**	**0.340**	**0.350**	**0.379**	**0.407**	**0.417**
Dki Jakarta	0.218	0.266	0.294	0.277	0.314	0.357	0.363	0.405	0.424
Jawa Barat	0.212	0.248	0.258	0.247	0.309	0.304	0.356	0.390	0.399
Jawa Tengah	0.168	0.214	0.236	0.192	0.270	0.304	0.319	0.362	0.381
Di Yogyakarta	0.239	0.280	0.286	0.274	0.316	0.356	0.380	0.417	0.419
Jawa Timur	0.200	0.206	0.210	0.238	0.257	0.271	0.347	0.357	0.358
Banten	0.214	0.259	0.252	0.239	0.355	0.297	0.360	0.395	0.394
Bali	0.142	0.252	0.264	0.157	0.298	0.291	0.291	0.393	0.402
Kalimantan	**0.196**	**0.217**	**0.221**	**0.222**	**0.248**	**0.253**	**0.343**	**0.364**	**0.368**
Kalimantan Barat	0.165	0.219	0.236	0.181	0.251	0.279	0.312	0.368	0.383
Kalimantan Tengah	0.131	0.182	0.192	0.143	0.223	0.221	0.281	0.332	0.344
Kalimantan Selatan	0.178	0.213	0.198	0.208	0.250	0.234	0.328	0.361	0.349
Kalimantan Timur	0.216	0.190	0.191	0.236	0.215	0.221	0.358	0.341	0.342
Sulawesi	**0.195**	**0.262**	**0.287**	**0.218**	**0.317**	**0.352**	**0.341**	**0.400**	**0.419**
Sulawesi Utara	0.166	0.228	0.282	0.195	0.258	0.324	0.313	0.376	0.417
Sulawesi Tengah	0.190	0.208	0.246	0.210	0.256	0.324	0.336	0.356	0.388
Sulawesi Selatan	0.204	0.289	0.308	0.227	0.353	0.379	0.350	0.420	0.433
Sulawesi Tenggara	0.182	0.259	0.262	0.201	0.324	0.300	0.330	0.397	0.400
Gorontalo	0.190	0.284	0.323	0.218	0.349	0.425	0.340	0.414	0.442
Sulawesi Barat	0.186	0.224	0.204	0.218	0.254	0.248	0.335	0.374	0.355
Lainnya	**0.218**	**0.226**	**0.240**	**0.234**	**0.258**	**0.285**	**0.363**	**0.375**	**0.386**
Nusa Tenggara Barat	0.170	0.204	0.205	0.192	0.250	0.238	0.319	0.356	0.358
Nusa Tenggara Timur	0.209	0.193	0.199	0.239	0.225	0.249	0.350	0.347	0.350
Maluku	0.154	0.219	0.197	0.158	0.246	0.220	0.301	0.367	0.349
Maluku Utara	0.179	0.173	0.158	0.183	0.190	0.172	0.327	0.328	0.315
Papua Barat	0.224	0.258	0.285	0.209	0.263	0.323	0.356	0.393	0.416
Papua	0.288	0.248	0.296	0.272	0.264	0.350	0.406	0.390	0.427
Total	0.219	0.252	0.264	0.254	0.310	0.323	0.362	0.393	0.402
Intra Pulau	0.216	0.249	0.261	0.251	0.307	0.320			
Andil (%)	(98.6)	(98.8)	(98.9)	(98.8)	(99.1)	(99.1)			
Antar Pulau	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003			
Andil (%)	(1.4)	(1.2)	(1.1)	(1.2)	(0.9)	(0.9)			
Intra Provinsi	0.187	0.222	0.233	0.217	0.276	0.288			
Andil (%)	(85.5)	(88.0)	(88.2)	(85.7)	(89.0)	(89.0)			
Antar Provinsi	0.032	0.030	0.031	0.036	0.034	0.035			
Andil (%)	(14.5)	(12.0)	(11.8)	(14.3)	(11.0)	(11.0)			

Sumber: SUSENAS 2008, 2011, 2013 (diolah)

Tabel 6: Rata-rata Pengeluaran per Kapita Rumahtangga per Bulan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan			Rasio Rata-Rata Pengeluaran Kota terhadap Desa			Andil Rumahtangga Perkotaan (%)		
	2008	2011	2013	2008	2011	2013	2008	2011	2013
Tidak Tamat SD	308,000	398,000	482,000	1.2	1.2	1.2	29.8	34.0	33.9
Sekolah Dasar	343,000	444,000	538,000	1.3	1.2	1.3	42.3	39.2	39.2
SMP	428,000	549,000	662,000	1.4	1.3	1.3	53.5	52.5	52.5
SMA	585,000	762,000	939,000	1.5	1.4	1.5	72.0	70.9	70.9
Diploma I/II	646,000	902,000	1,200,000	1.4	1.4	1.5	54.6	57.2	64.8
Diploma III	913,000	1,250,000	1,520,000	1.6	1.7	1.8	85.0	84.0	84.2
Diploma IV/S1	1,010,000	1,330,000	1,660,000	1.8	1.7	1.7	82.8	81.1	81.3
S2/S3	1,590,000	1,790,000	2,540,000	1.6	1.6	1.9	93.6	90.5	89.6
Total	436,718	581,635	713,882	1.7	1.7	1.7	48.3	49.8	50.1

Sumber: SUSENAS 2008, 2011, 2013 (diolah)

Tabel 7: Dekomposisi Kesenjangan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Theil L			Theil T			Gini		
	2008	2011	2013	2008	2011	2013	2008	2011	2013
Tidak Tamat SD	0.136	0.161	0.161	0.144	0.194	0.191	0.286	0.315	0.315
Sekolah Dasar	0.146	0.164	0.169	0.154	0.196	0.203	0.296	0.317	0.322
SMP	0.155	0.182	0.190	0.167	0.221	0.224	0.304	0.334	0.343
SMA	0.178	0.212	0.231	0.197	0.244	0.268	0.326	0.358	0.375
Diploma I/II	0.170	0.228	0.239	0.202	0.313	0.267	0.319	0.367	0.381
Diploma III	0.209	0.269	0.255	0.252	0.399	0.287	0.354	0.394	0.390
Diploma IV/S1	0.231	0.250	0.258	0.261	0.286	0.286	0.375	0.387	0.393
S2/S3	0.291	0.226	0.313	0.334	0.260	0.394	0.422	0.371	0.428
Total	0.219	0.252	0.264	0.254	0.310	0.323	0.362	0.393	0.402
Intra Kelompok	0.156	0.182	0.191	0.181	0.231	0.239			
Andil (%)	(71.3)	(72.5)	(72.3)	(71.6)	(74.6)	(74.0)			
Antar Kelompok	0.063	0.069	0.073	0.072	0.079	0.084			
Andil (%)	(28.7)	(27.5)	(27.7)	(28.4)	(25.4)	(26.0)			

Sumber: SUSENAS 2008, 2011, 2013 (diolah)

Tabel 8: Rata-rata Pengeluaran per Kapita Rumahtangga per Bulan Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan			Rasio Rata-Rata Pengeluaran Kota terhadap Desa			Andil Rumahtangga Perkotaan (%)		
	2008	2011	2013	2008	2011	2013	2008	2011	2013
Laki-laki	435,000	579,000	711,000	1.7	1.7	1.7	48.7	49.4	49.7
Perempuan	454,000	603,000	740,000	1.8	1.8	1.8	53.1	53.2	53.5
Total	436,718	581,635	713,882	1.7	1.7	1.7	48.3	49.8	50.1

Sumber: SUSENAS 2008, 2011, 2013 (diolah)

Tabel 9: Dekomposisi Kesenjangan Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Theil L			Theil T			Gini		
	2008	2011	2013	2008	2011	2013	2008	2011	2013
Laki-laki	0.217	0.250	0.261	0.249	0.309	0.320	0.360	0.391	0.400
Perempuan	0.241	0.265	0.285	0.290	0.314	0.350	0.380	0.404	0.418
Total	0.219	0.252	0.264	0.254	0.310	0.323	0.362	0.393	0.402
Intra Kelompok	0.219	0.252	0.264	0.254	0.310	0.323			
Andil (%)	(99.96)	(99.97)	(99.97)	(99.96)	(99.98)	(99.98)			
Antar Kelompok	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001			
Andil (%)	(0.04)	(0.03)	(0.03)	(0.04)	(0.03)	(0.02)			

Sumber: SUSENAS 2008, 2011, 2013 (diolah)

Tabel 10: Rata-rata Pengeluaran per Kapita Rumahtangga per Bulan Berdasarkan Jumlah Anggota Rumah Tangga

Jumlah ART	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan			Rasio Rata-Rata Pengeluaran Kota terhadap Desa			Andil Rumahtangga Perkotaan (%)		
	2008	2011	2013	2008	2011	2013	2008	2011	2013
1	713,000	1,080,000	1,410,000	2.1	2.0	2.3	52.38	56.74	56.54
2	522,000	749,000	946,000	1.7	1.7	1.8	44.85	47.93	47.00
3	471,000	638,000	790,000	1.6	1.6	1.6	46.62	45.90	47.03
4	438,000	580,000	715,000	1.6	1.6	1.7	49.28	49.70	50.16
5	417,000	544,000	664,000	1.7	1.7	1.7	50.51	51.24	51.03
6	396,000	517,000	611,000	1.8	1.8	1.7	49.85	51.43	51.16
7	385,000	489,000	616,000	1.8	1.8	1.9	50.43	51.65	51.31
8	359,000	450,000	564,000	1.8	1.6	1.8	50.47	50.92	52.33
9	403,000	417,000	525,000	2.3	1.5	1.7	49.64	52.68	54.59
10+	410,000	472,000	507,000	2.2	1.9	1.7	55.07	54.02	54.45
Total	436,718	581,635	713,882	1.7	1.7	1.7	48.3	49.8	50.1

Sumber: SUSENAS 2008, 2011, 2013 (diolah)

Tabel 11: Dekomposisi Kesenjangan Berdasarkan Jumlah Anggota Rumah Tangga

Jumlah ART	Theil L			Theil T			Gini		
	2008	2011	2013	2008	2011	2013	2008	2011	2013
1	0.288	0.310	0.314	0.324	0.348	0.325	0.418	0.429	0.429
2	0.224	0.263	0.275	0.261	0.314	0.322	0.369	0.399	0.408
3	0.188	0.220	0.223	0.219	0.277	0.273	0.337	0.366	0.370
4	0.193	0.222	0.232	0.221	0.267	0.279	0.340	0.370	0.379
5	0.212	0.247	0.255	0.243	0.305	0.312	0.357	0.390	0.397
6	0.226	0.265	0.259	0.263	0.350	0.327	0.368	0.402	0.399
7	0.241	0.260	0.309	0.284	0.323	0.462	0.381	0.400	0.431
8	0.229	0.234	0.276	0.265	0.289	0.372	0.372	0.380	0.410
9	0.334	0.193	0.247	0.448	0.216	0.323	0.445	0.348	0.389
10+	0.322	0.323	0.257	0.385	0.438	0.334	0.440	0.443	0.395
Total	0.219	0.252	0.264	0.254	0.310	0.323	0.362	0.393	0.402
Intra Kelompok	0.213	0.240	0.250	0.247	0.297	0.308			
Andil (%)	(97.3)	(95.4)	(94.7)	(97.5)	(96.0)	(95.3)			
Antar Kelompok	0.006	0.012	0.014	0.006	0.012	0.015			
Andil (%)	(2.7)	(4.6)	(5.3)	(2.5)	(4.0)	(4.7)			

Sumber: SUSENAS 2008, 2011, 2013 (diolah)

Tabel 12: Rata-rata Pengeluaran per Kapita Rumahtangga per Bulan Berdasarkan Kelompok Usia

Kelompok Usia	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan			Rasio Rata-Rata Pengeluaran Kota terhadap Desa			Andil Rumahtangga Perkotaan (%)		
	2008	2011	2013	2008	2011	2013	2008	2011	2013
<=19	702,000	912,000	1,380,000	2.4	2.2	2.4	64.4	64.9	71.1
20-24	572,000	771,000	1,020,000	2.1	2.1	2.3	54.4	50.6	55.6
25-29	456,000	594,000	754,000	1.7	1.7	1.8	47.1	46.1	46.3
30-34	430,000	577,000	707,000	1.6	1.6	1.6	47.6	47.8	49.3
35-39	413,000	557,000	688,000	1.6	1.6	1.7	46.9	48.7	49.9
40-44	431,000	574,000	682,000	1.6	1.6	1.6	49.3	50.4	49.5
45-49	443,000	594,000	719,000	1.7	1.7	1.7	48.7	49.8	51.1
50-54	453,000	604,000	740,000	1.7	1.7	1.7	49.8	50.9	51.2
55-59	462,000	593,000	745,000	1.8	1.7	1.7	49.8	51.1	51.9
60-64	430,000	571,000	721,000	1.7	1.7	1.8	47.7	51.2	50.6
65+	408,000	540,000	658,000	1.8	1.7	1.7	46.0	51.6	48.6
Total	436,718	581,635	713,882	1.7	1.7	1.7	48.3	49.8	50.1

Sumber: SUSENAS 2008, 2011, 2013 (diolah)

Tabel 13: Dekomposisi Kesenjangan Berdasarkan Kelompok Usia

Kelompok Usia	Theil L			Theil T			Gini		
	2008	2011	2013	2008	2011	2013	2008	2011	2013
<=19	0.285	0.289	0.326	0.317	0.283	0.301	0.407	0.410	0.425
20-24	0.237	0.309	0.304	0.240	0.346	0.310	0.377	0.433	0.425
25-29	0.192	0.223	0.240	0.211	0.256	0.274	0.339	0.370	0.384
30-34	0.197	0.227	0.230	0.222	0.276	0.268	0.344	0.373	0.377
35-39	0.201	0.235	0.246	0.229	0.289	0.297	0.346	0.380	0.390
40-44	0.212	0.247	0.243	0.242	0.312	0.293	0.356	0.388	0.387
45-49	0.227	0.264	0.266	0.268	0.323	0.323	0.369	0.402	0.404
50-54	0.222	0.268	0.280	0.254	0.343	0.350	0.366	0.404	0.414
55-59	0.242	0.259	0.290	0.288	0.316	0.361	0.382	0.399	0.421
60-64	0.222	0.256	0.292	0.261	0.309	0.402	0.366	0.396	0.421
65+	0.234	0.260	0.280	0.288	0.325	0.358	0.374	0.399	0.414
Total	0.219	0.252	0.264	0.254	0.310	0.323	0.362	0.393	0.402
Intra kelompok	0.217	0.250	0.262	0.252	0.308	0.321			
Andil (%)	(99.3)	(99.4)	(99.2)	(99.3)	(99.5)	(99.3)			
Antar kelompok	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002			
Andil (%)	(0.7)	(0.6)	(0.8)	(0.7)	(0.5)	(0.7)			

Sumber: SUSENAS 2008, 2011, 2013 (diolah)

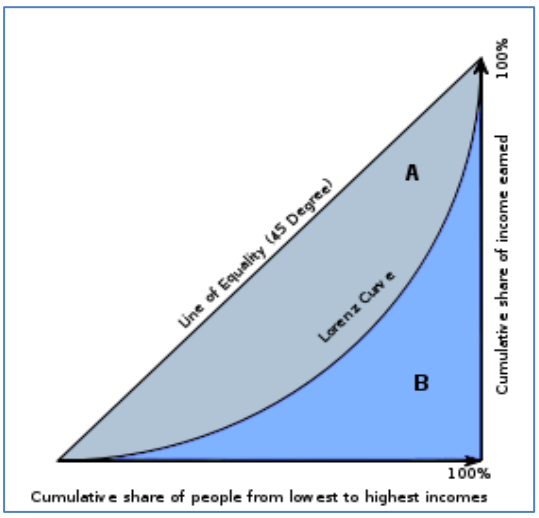

Sumber: en.wikipedia.org/wiki/**Lorenz_curve**

Gambar 1: Kurva Lorenz

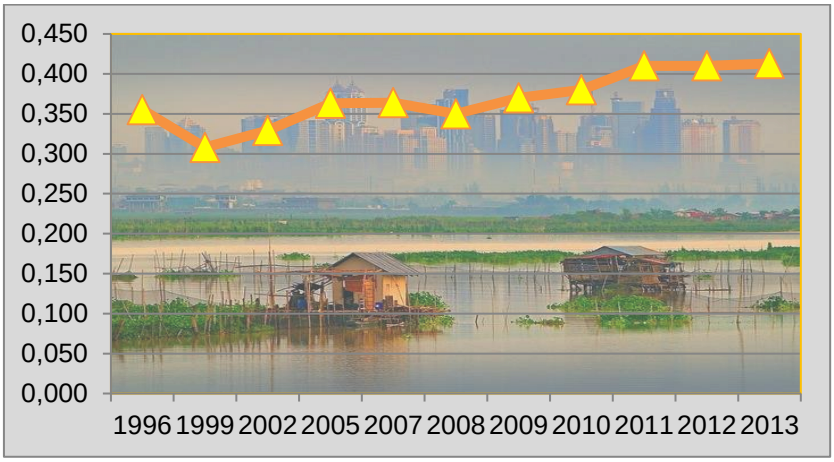

Sumber: BPS RI (berdasarkan SUSENAS kondisi Maret)

Gambar 2: Perkembangan Indeks Gini Indonesia dari Tahun 1996-2013